

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP IPM, TPT, TPAK DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

THE EFFECT OF FISCAL BALANCE FUND AND REGIONAL CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, WORKFORCE PARTICIPATION RATE, AND PERCENTAGE OF POOR POPULATION

Slamet Widodo⁹, Kiki Zakiah¹⁰

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of fiscal balance funds and regional capital expenditure on the Human Development Index (IPM), Open Unemployment Rate (TPT), Workforce Participation Rate (TPAK), and Percentage of Poor Population in municipalities/cities. The research used secondary data from 309 municipalities/cities for the period of 2020-2021 from the Central Agency of Statistic (BPS), the Ministry of Finance, and other related institutions. The research methodology used Regression of the Data Panel with Fixed Effect Model and Ordinary Least Square estimation. The results of the research show that the Fiscal Balance Fund and regional capital expenditures variables significantly influence the IPM, TPT, TPAK, and percentage of the poor population in a negative/positive direction.

Keywords: *Fiscal balance fund, Regional Capital Expenditure, People's Welfare Indicators*

I. PENDAHULUAN

APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan APBN sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk kemakmuran rakyat. Keberpihakan APBN dalam menyejahterakan rakyat dalam dilihat dari pos belanja negara dan subsidi sebagai bagian dari berbagai program prioritas pemerintah di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor-sektor lainnya, yang dikelola oleh kementerian/lembaga. Melalui fungsi alokasi, APBN diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya ekonomi. Melalui fungsi distribusi, APBN diarahkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah, antar masyarakat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas

⁹ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; slamet.widodo@dpr.go.id

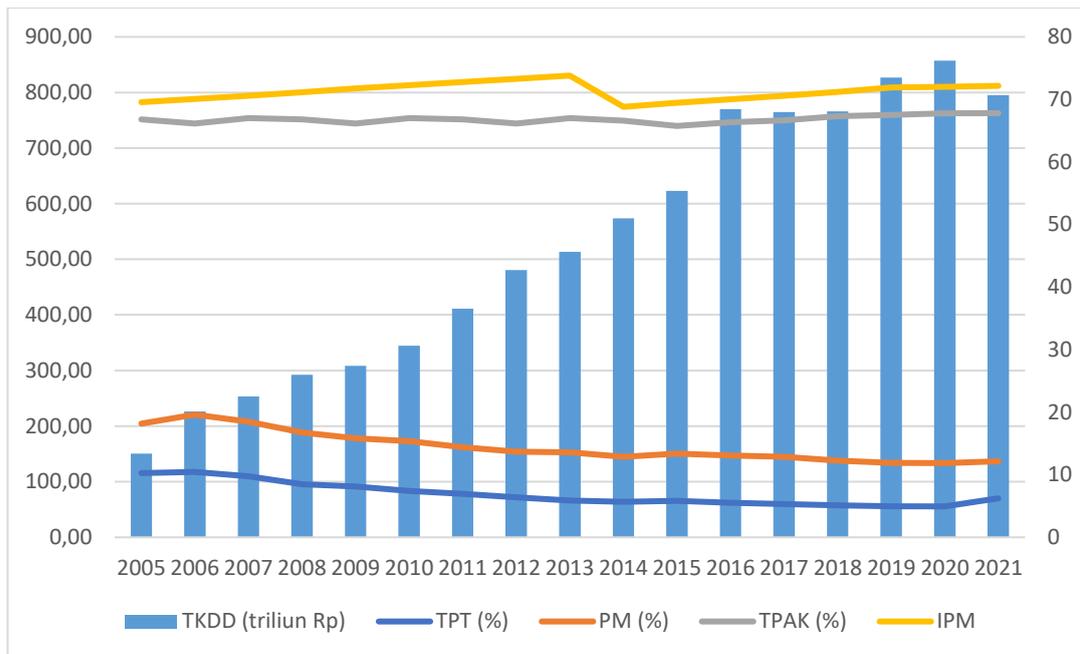
¹⁰ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270; kiki.zakiah@dpr.go.id

ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak atau guncangan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang telah dilakukan di awal tahun 2000 menjadikan upaya percepatan mewujudkan kesejahteraan rakyat menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang kini menjadi urusan pemerintah daerah perlu diiringi dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana perimbangan merupakan salah satu pos dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Komponen terbesar dalam dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengalokasian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah karena faktor sumber daya alam yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur layanan publik, dan kesenjangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penerimaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Keberhasilan APBN dalam melaksanakan berbagai fungsinya dapat dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Sejak tahun 2010, pemerintah telah mencantumkan target indikator kesejahteraan rakyat dalam APBN. Di tahun 2011, pemerintah menetapkan target penurunan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja menjadi bagian dari pasal yang diatur dalam UU APBN. Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah juga memasukkan indikator kesejahteraan rakyat lainnya dalam pasal yang menjadi bagian dari target APBN. Pada tahun 2022, selain target penurunan kemiskinan, pemerintah juga mencantumkan target tingkat pengangguran terbuka, penurunan rasio gini, peningkatan IPM, dan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dalam APBN tahun 2022.



Gambar 1. Perkembangan TKDD, IPM, TPT, TPAK, PM, Tahun 2005-2021

Sumber: BPS, diolah

Sepanjang tahun 2005 – 2021 laju pertumbuhan TKDD setiap tahun sebesar 11 persen. Laju pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan laju peningkatan IPM dan TPAK yang hanya tumbuh sebesar 1,6 persen setiap tahunnya. Namun laju pertumbuhan TKDD ini mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 49 persen dari 18,20 persen di tahun 2005 menjadi 12,18 persen di tahun 2021 dengan laju penurunan setiap tahunnya sebesar 9,4 persen, dan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 64 persen dari 10,26 persen di tahun 2005 menjadi sebesar 6,26 persen di tahun 2021 dengan laju penurunan setiap tahunnya sebesar 16,6 persen.

Perbaikan target indikator kesejahteraan rakyat tersebut tentunya merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemerintah daerah belum secara eksplisit mencantumkan target indikator kesejahteraan rakyat dalam APBD, namun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan adanya harmonisasi antara dokumen perencanaan di tingkat daerah dan pusat, maka target indikator tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang dijabarkan dalam prioritas-prioritas daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengalokasikan belanja modal yang memadai untuk mencapai target kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2018, pemerintah telah mewajibkan minimal alokasi 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Namun belanja pegawai dan belanja barang/jasa masih tetap mendominasi pos belanja APBD di tahun 2019, belanja modal hanya 19,19 persen dari belanja APBD. Proporsi belanja modal terhadap total belanja APBD justru semakin menurun yang sebesar 19,16 persen di tahun 2020, dan 17,1 persen di tahun 2021.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh transfer pemerintah pusat dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD terhadap indikator

kesejahteraan masyarakat di daerah mencakup IPM, TPT, TPAK dan persentase penduduk miskin. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan transfer ke daerah di masa mendatang tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai urusannya saja, namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun fokus penelitian ini telah menjadi tema yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian, namun pengambilan sampel penelitian yang mencakup lebih dari 60 persen jumlah kabupaten/kota di Indonesia juga diharapkan dapat memberikan gambaran umum terkait pengaruh dana transfer pusat dan alokasi belanja modal daerah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu arah prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pengukuran SDM berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan dengan menggunakan suatu indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat/penduduk, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara dan merupakan data strategis karena selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan alokasi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (BPS, 2022).

UNDP (1990) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling memengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Skor IPM Indonesia tahun 2021 menurut HDR UNDP adalah sebesar 0,705. Skor tersebut masuk dalam kategori “tinggi”, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) 67,6 tahun, Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLs) adalah 13,7 tahun dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,6 tahun, dan pendapatan nasional per kapita USD11.466 (UNDP, 2022). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat; (2) pengetahuan; dan (3) standar hidup layak. Konsep IPM mengutamakan adanya empat unsur, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Jahan (2013) menyatakan bahwa IPM masih belum dapat menyediakan informasi secara komprehensif tentang pembangunan manusia karena hanya menyediakan satu angka yang tidak banyak memberikan gambaran secara khusus di dalamnya. Meskipun demikian, IPM dinilai masih relevan digunakan dalam penelitian luas karena dihitung berdasarkan beberapa dimensi yang cukup representatif yaitu IPM hanya berfokus dalam dimensi dasar perkembangan manusia, tersusun atas tujuan jangka panjang, tersusun atas jumlah parameter minimum yang dianggap cukup mendekati, berperan sebagai ukuran rata-rata atas kesenjangan di suatu negara, dan berperan sebagai proksi dalam mengukur sumber daya yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang layak secara rata-rata. Dengan kata lain, IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang tercermin melalui kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan Kesehatan, penghasilan dan pekerjaan sebagaimana konsep yang dirumuskan UNDP.

2. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Keberhasilan suatu negara menurunkan tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan; (3) akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Bappenas, 2021). Hardinandar (2019) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. Kemiskinan merupakan salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi untuk menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah (Oktaviana et al., 2021). Efektivitas pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD di daerah diharapkan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di daerah.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar atau disebut *Basic Needs Approach*. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita berada di bawah garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong miskin (Badan Pusat Statistik).

Kemiskinan diantaranya disebabkan karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat

kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) biasanya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta pendidikan dan kesehatan yang umumnya tidak memadai (World Bank, 2004).

Prayoga et al. (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Upah minimum dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan dan bakat (Todaro & Stephen C, 2014). Pangiuk (2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015).

3. Pengangguran

Pengangguran muncul akibat adanya permasalahan standar hidup yang rendah seperti pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Dalam indikator ketenagakerjaan, BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi tidak dapat melakukannya sehingga dianggap sebagai sumber daya yang terbuang (Sukirno, 2013). Efektivitas pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam APBD di daerah diharapkan dapat mengurangi persentase penduduk miskin di daerah. Prioritas pembangunan di daerah, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, namun juga mengurangi jumlah pengangguran, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berhubungan dengan pengetahuan atau karakteristik tenaga kerja yang dimiliki untuk dapat produktif, karena tenaga kerja merupakan faktor yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja sangat didasari oleh kualitas tenaga kerja melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja didapat melalui pendidikan karena pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh terhadap upah yang diterima pekerja (Aji et al., 2020).

Sukirno (2004) menjelaskan bahwa angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang berkerja dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau menerima pendapatan.

Meningkatnya kewenangan pemerintah daerah berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah yang tentunya mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah.

5. Desentralisasi Fiskal dan Dana Perimbangan

Desentralisasi fiskal menghendaki adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal kepada masyarakatnya. Namun, realitanya tidak semua daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan daerahnya dan mampu lepas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih sangat diperlukan. Campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk transfer dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah (www.ksap.org).

Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), penggunaan DAU didasarkan pada mekanisme *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan *specific grant* (ditentukan penggunaannya). Penggunaan DAU diarahkan untuk pendidikan, layanan umum, kesehatan dan pekerjaan umum dan disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi anggaran dengan ketentuan: 1) paling cepat pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; 2) paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember; dan 3) memperhatikan realisasi pembayaran gaji guru PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan guru PPPK.

DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022, DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar, sedangkan DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang yang kurang dari 1 miliar dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Jenis alokasi DAK Nonfisik berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, meliputi: Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan dan DAK Nonfisik jenis lainnya (bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dana ketahanan pangan dan pertanian, dana fasilitas penanaman modal, dana layanan kepariwisataan, bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BLPS), dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak (Dana PPA), dana penguatan kapasitas kelembagaan usaha mikro kecil dan dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.

DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) dan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sedangkan DBH SDA, terdiri dari DBH Kehutanan, DBH Mineral dan Batu Bara, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH Panas Bumi, DBH Perikanan dan DBH Perkebunan Sawit. Penggunaan DBH berdasarkan PMK Nomor 139 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yaitu *block grant* (tidak ditentukan penggunaannya) dan *specific grant* (ditentukan penggunaannya). Penyaluran DBH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, artinya bahwa penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun berjalan. Untuk tahun 2023, berdasarkan UU HKPD, alokasi DBH didasarkan pada realisasi DBH tahun anggaran sebelumnya.

6. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang bersifat langsung yang dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Belanja modal umumnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam bentuk belanja tanah, belanja peralatan dan belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset lainnya. Belanja modal diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan dan penduduk miskin.

Bastian (2016) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan dalam kinerja keuangan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka belanja modal yang dilakukan terlaksana dengan baik dan apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan belanja sangat bagus. Namun sebaliknya, apabila pencapaian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau kurang dari yang direncanakan, maka belanja modalnya jelek.

Belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

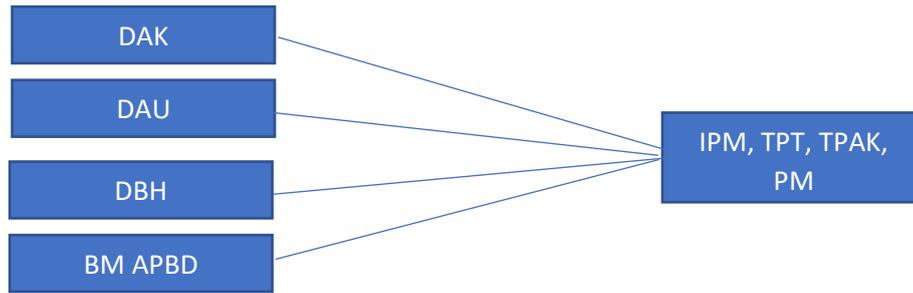
7. Penelitian Terdahulu

- a. Studi Harahap (2011) mengenai pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap IPM pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM, karena pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat sedikit.
- b. Studi Setyowati dan Suparwati (2012) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa DAK, DAU dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sementara pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM.
- c. Studi Fatimah (2020) mengenai kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut ternyata tidak semuanya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hasil variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena DAU merupakan dana limpahan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan di daerah yang digunakan untuk tujuan desentralisasi. DAU dinilai lebih mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan DAK dan DBH yang hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.
- d. Studi Permata dan Jember (2015) tentang Pengaruh Dana Perimbangan Yang Dimoderasi Belanja Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan belanja langsung bukan merupakan variabel pemoderasi yang dapat mengetahui seberapa besar peran belanja langsung dalam memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh DAK, DAU, DBH dan Belanja Modal APBD terhadap IPM, TPT, TPAK, dan PM. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2020-2021, dan data *cross section* yang terdiri atas 309 kabupaten/kota. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Desain Penelitian

2. Model Penelitian

Model persamaan pengaruh DAK, DAU, DBH dan Belanja Modal APBD terhadap IPM, TPT, TPAK, dan PM sebagai berikut :

$$IPM = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (1)$$

$$TPT = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (2)$$

$$TPAK = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3)$$

$$PM = a + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan :

- BM = Belanja Modal APBD (miliar Rp)
- DAU = Dana Alokasi Umum (miliar Rp)
- DBH = Dana Bagi Hasil (miliar Rp)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota (persen)
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (persen)
- TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (persen)
- PM = Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (persen)
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien
- i = *cross section*
- t = *time series*
- ε_i = *error term*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

a. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*.

1) Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui *chow test* untuk menentukan apakah *common effect model (CEM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05, maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Tabel 1. Hasil Uji Chow-test

	IPM			TPT		
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	62,189084	(287,283)	0,0000	9,313776	(287,283)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	2391,969120	287	0,0000	1349,044066	287	0,0000

	IPM			PM		
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	8,606944	(287,283)	0,0000	136,061755	(287,283)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	1308,165063	287	0,0000	2837,260001	287	0,0000

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan baik *F-test* maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 lebih kecil dari 5 persen) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti *Fixed Effect*. Namun sebelum menentukan model terpilih, terlebih dahulu menguji model dengan *Random Effect*.

2) Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman-test untuk menentukan apakah *Random effect model (REM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka Tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test

IPM				TPT		
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	163,588669	4	0,0000	51,074101	4	0,0000

TPAK				IPM		
Test Summary	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d,f,	Prob,	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d,f,	Prob,
Cross-section random	23,336082	4	0,0001	41,492732	4	0,0000

Sumber : BPS,2022 (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (p -value 0,0000 kurang dari 0,05 persen), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, Dengan demikian model mengikuti *Fixed Effect*.

Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa untuk kasus ini, model FE lebih baik daripada model RE dan CE, sehingga tidak harus dilakukan uji selanjutnya (*Lagrange Multiplier Test*).

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji linieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Dalam kasus data panel, dimana struktur dan sifat datanya seringkali memiliki hubungan/korelasi dengan data sebelumnya, maka tidak seluruh uji asumsi klasik dapat dilakukan untuk model data panel. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Dengan demikian uji asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi data panel hanya uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Hipotesis dan kaidah keputusan:

H_0 : tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas pada model regresi, jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,85.

H_1 : ada multikolinieritas antar variabel bebas pada model regresi, jika nilai korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

IPM	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

PM	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

TPT	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

TPAK	DAK	DAU	DBH	BM
DAK	1,000	0,827	0,144	0,519
DAU	0,827	1,000	0,293	0,506
DBH	0,144	0,293	1,000	0,194
BM	0,519	0,506	0,194	1,000

Sumber : BPS, (data diolah)

Berdasarkan hasil output, nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas $< 0,85$ maka H_1 ditolak, keputusannya tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya CE dan FE saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi CE dan FE masih menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* sedangkan RE sudah menggunakan *Generalize Least Square (GLS)* yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

IPM	Signifikansi	Heteroskedastisitas
NLOGDAK	0,5445 > (α) 0,05	Tidak ada
NLOGDAU	0,0000 < (α) 0,05	ada
NLOGDBH	0,3940 > (α) 0,05	Tidak Ada
NLOGBM	0,0394 > (α) 0,05	Tidak ada

TPT	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,0087 < (α) 0,05	Ada
DAU	0,2534 > (α) 0,05	Tidak ada
DBH	0,5115 > (α) 0,05	Tidak ada
BM	0,8056 > (α) 0,05	Tidak ada

TPAK	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,5081 > (α) 0,05	Tidak ada
DAU	0,8630 > (α) 0,05	Tidak ada
DBH	0,0479 < (α) 0,05	Ada
BM	0,4728 > (α) 0,05	Tidak ada

PM	Signifikansi	Heteroskedastisitas
DAK	0,9957 > (α) 0,05	Tidak ada
DAU	0,4781 > (α) 0,05	Tidak ada
DBH	0,0001 < (α) 0,05	Ada
BM	0,7994 > (α) 0,05	Tidak ada

Sumber : BPS, (data diolah)

c. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*, Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik dan uji koefisien determinasi (R²).

Berdasarkan model terpilih yang telah melewati uji multikolinearitas dan heterokedastisitas, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1) Uji *F-statistic*

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji F-statistic

IPM			TPT		
Nilai F-Statistic	Nilai P-value	Kesimpulan	Nilai F-Statistic	Nilai P-value	Kesimpulan
67,33903	0,000000	Signifikan	10,02026	0,000000	Signifikan
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$					
TPAK			PM		
Nilai F-Statistic	Nilai P-value	Kesimpulan	Nilai F-Statistic	Nilai P-value	Kesimpulan
8,626891	0,000000	Signifikan	18,79119	0,000000	Signifikan
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$					

Sumber : BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Uji t–statistic

Uji $t\text{-statistic}$ dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian $t\text{-statistic}$ adalah:

H_0 : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_1 : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas nilai t-hitung $> 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai t-hitung $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

Tabel 6. Hasil Regresi Model FE

	Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
IPM	C	-0,014911	0,003124	-4,77367	0,0000
	NLOGDAK	0,002556	0,004212	0,60681	0,5445
	NLOGDAU	0,826274	0,055903	14,78059	0,0000
	NLOGDBH	0,002426	0,002842	0,853612	0,3940
	NLOGBM	-0,005559	0,002686	-2,069284	0,0394
TPT	C	0,067864	0,041727	1,626371	0,1050
	NLOGDAK	-0,049072	0,081162	-0,604619	0,5459
	NLOGDAU	-4,480758	1,080762	-4,145924	0,0000
	NLOGDBH	0,091622	0,054875	1,669641	0,0961
	NLOGBM	-0,017814	0,051802	-0,343888	0,7312
TPAK	C	17,56181	12,6883	1,384095	0,1674
	DAK	-0,005597	0,004762	-1,175363	0,2408
	DAU	0,090165	0,022456	4,015267	0,0001
	DBH	-0,00781	0,021086	-0,370367	0,7114
	BM	0,006813	0,002823	2,413814	0,0164
PM	C	1,295019	0,488449	2,651288	0,0082
	LOG(DAK)	0,340244	0,078402	4,339747	0,0000
	LOG(DAU)	-0,119146	0,11956	-0,996534	0,3194
	LOG(DBH)	-0,266856	0,030745	-8,679673	0,0000
	LOG(BM)	0,163295	0,062423	2,615945	0,0091

Sumber : BPS, (data diolah)

3) Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$\ln IPM = -0,0149113019534 + 0,002556 \ln DAK + 0,826273 \ln DAU + 0,002423 \ln DBH - 0,005559 \ln BM$$

- DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,0025 persen.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, jika DAU naik 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,82 persen.
- DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, jika DBH naik 1 miliar, maka IPM meningkat sebesar 0,0024 persen.

- Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, jika BM naik 1 miliar, maka IPM menurun sebesar 0,0055 persen.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$\ln TPT = 0,0678639778425 + 0,049072 \ln DAK + 4,480757 \ln DAU \\ + 0,091622 \ln DBH - 0,017814 \ln BM$$

- DAK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap TPT, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka TPT menurun sebesar -0,0490 persen.
- DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, jika DAU naik 1 miliar, maka TPT menurun sebesar -4,48 persen.
- DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap TPT, jika DBH naik 1 miliar, maka TPT meningkat sebesar 0,09 persen.
- BM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPT, jika BM meningkat 1 miliar, maka TPT akan menurun sebesar -0,017 persen.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

$$TPAK = 17,5618050821 - 0,0055965DAK + 0,090165DAU - 0,007809DBH \\ + 0,006813BM$$

- DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka TPAK menurun sebesar 0,005 persen.
- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, jika DAU naik 1 miliar, maka TPAK meningkat sebesar 0,09 persen.
- DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK, jika DBH naik 1 miliar, maka TPAK menurun sebesar 0,007 persen.
- BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, jika BM naik 1 miliar, TPAK akan meningkat 0,006 persen.

d) Persentase Penduduk Miskin (PM)

$$\log PM = 1,29501947756 + 0,340244 \log DAK - 0,119145 \log DAU \\ - 0,266855 \log DBH + 0,163294 \log BM$$

- DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PM, jika DAK meningkat sebesar 1 miliar, maka PM meningkat sebesar 0,34 persen.
- DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PM, jika DAU naik 1 miliar, maka PM menurun sebesar -0,11 persen.
- DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PM, jika DBH naik 1 miliar, maka PM menurun sebesar -0,26 persen.
- BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PM, jika BM naik 1 miliar, maka PM meningkat sebesar 0,16 persen.

2. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil regresi pengaruh dana transfer pusat dan belanja modal daerah terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan tingkat signifikansi hubungan masing-masing variabel bebas yaitu DAK, DAU, DB dan BM terhadap variabel terikatnya yaitu IPM, PM, TPT, dan TPAK sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Tingkat Signifikansi

	DAK	DAU	DBH	BM	R2
IPM	(+) tidak signifikan	(+) signifikan	(+) tidak signifikan	(-) signifikan	0,447099
PM	(+) signifikan	(-) tidak signifikan	(-) signifikan	(+) signifikan	0,193254
TPT	(-) tidak signifikan	(-) signifikan	(+) tidak signifikan	(-) tidak signifikan	0,064709
TPAK	(-) tidak signifikan	(+) signifikan	(-) tidak signifikan	(+) signifikan	0,898691

Sumber : BPS, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa :

a. Kenaikan DAK akan meningkatkan penduduk miskin

DAK merupakan transfer pusat untuk pembangunan fisik dan non fisik. Dana ini memang tidak secara khusus untuk ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan namun untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam hal infrastruktur layanan dasar,

b. Kenaikan DAU akan meningkatkan IPM, menurunkan TPT dan meningkatkan TPAK

DAU merupakan dana yang bersifat *semi block grant* yang masih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur tujuan penggunaannya. Meskipun ada ketentuan *mandatory* (25 persen untuk infrastruktur layanan dasar), dan sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai, namun dengan prinsip *holdharmless* (daerah tidak akan mengalami penurunan DAU) pemerintah daerah dapat mengalokasikan sesuai kebutuhan prioritas daerah untuk berbagai program yang memberi kontribusi bagi peningkatan IPM, menurunkan TPT dan meningkatkan TPAK.

c. Kenaikan DBH akan menurunkan PM

Sebagian besar DBH merupakan dana yang bersifat *block grant* yang memungkinkan daerah mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dalam hal pengentasan kemiskinan.

d. Kenaikan BM daerah akan menurunkan IPM, meningkatkan PM dan meningkatkan TPAK

Meskipun BM daerah merupakan pos yang efektif untuk meningkatkan perekonomian daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM, namun karena sebagian besar daerah belum mengalokasikan minimum 25 persen untuk belanja infrastruktur layanan publik, maka efektivitas belanja modal daerah dalam penyediaan infrastruktur layanan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari komponen IPM dan berkontribusi bagi penurunan PM belum dapat secara optimal berkontribusi bagi peningkatan IPM dan penurunan PM.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. DAU berpengaruh signifikan secara positif dan belanja modal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap IPM. Variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap IPM;
2. DAK dan belanja modal berpengaruh signifikan secara positif dan DBH berpengaruh signifikan secara negatif terhadap persentase penduduk miskin, sementara variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin;
3. DAU berpengaruh signifikan secara negatif terhadap TPT, sedangkan variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap TPT; dan
4. DAU dan belanja modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap TPAK, sedangkan variabel independen lainnya tidak signifikan berpengaruh terhadap TPAK.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja daerah, utamanya dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif berupa peningkatan persentase alokasi belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil koefisien regresi yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar model yang belum tercakup dalam model persamaan penelitian ini. Penambahan variabel lain yang terkait dengan indikator kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki hasil penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berkontribusi dalam Jurnal Budget dan kepada tim redaktur dan mitra bestari yang telah memfasilitasi dan mereview artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S., Yussof, I., Saukani, M. N. M., & Baharin, R. (2020). *Does Education Increase Labor Productivity? An Evidence from Indonesia during Reform Era*
- Andykha, Ridho., & Handayani, Herniwati Retno (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Bastian, Indra. 2016. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bustamam, Nawarti. Yulyanti, Shinta., & Kantthi Septiana Dewi. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 1 (2021), Hal. 85-92. Diakses melalui <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

- Fatimah, Nurul Ari. 2020. Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)* Vol. 4 No. 2-2020.
- Harahap, Riva Ubar. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 11 No. 1/Maret 2011. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Larasati Prayoga, M., Muchtolifah., & Sishadiyati. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–143.
- O'Campo, P., Molnar, A., Renany, A., Mitchell, C., Shankardass, K., & Muntaner, C. (2015). *Social welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment insurance impacts poverty and health*. *Social Science & Medicine*, 132, 88–94.
- Okuputra, Muhammad Adryan & Nasikh. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. Volume. 18 Issue 1 (2022) Pages 159-166. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri, Malang*. ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online). DOI: 10.29264/jinv.v18i1.10379.
- Pangiuik, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(2), 44. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i2.160>
- Pertama, Anak Agung Imas & Jember, I Made. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan Yang Dimoderasi Belanja Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. E-Jurnal EP Unud, 4 [1] : 21 - 31 ISSN: 2303-0178
- Putriana, Rahayu. & Aji, Rizqon Halal Syah. (2022). Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Panel Dinamis, Fixed Effect Model (FEM). DOI: <https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.481>
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Prestasi* Vol. 9 No. 1 – Juni 2012.
- Sugianto. Yul Tito Permadhy. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* Vol 2 No 3 Bulan Juli 2020
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Stephen C, S. (2014). *Economic Development*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Wibowo, Anshor., & Monalisa. (2019) Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis*. 214pISSN 2549-

3086eISSN 2657-1676 <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jasJAS> (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2019, Vol.3, No.2: 212-225